

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Gambaran umum ini memberikan penjelasan tentang kondisi wilayah Kabupaten Klaten. Kondisi umum dapat diamati melalui berbagai aspek, termasuk geografi, ekonomi, demografi, sosial, dan budaya. Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Pemerintah Daerah Klaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 yang mengatur penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan wilayah strategis dengan peran penting dalam pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah (Klaten, 2024). Berdasarkan sumber dari BPS Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah sebesar 655,56 km² atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, yang menjadikan sebagai salah satu daerah dengan administrasi yang terstruktur (Klaten, 2024).

Klaten dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan sejarah, dengan banyak situs bersejarah seperti candi yang merupakan warisan budaya. Sektor pertanian dan kerajinan tangan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah ini. Selain itu, Klaten juga dikenal dengan produk-produk unggulannya, seperti batik, lurik, kerajinan gerabah, dan keramik yang dapat memenuhi kebutuhan lokal serta dapat menarik perhatian pasar nasional dan internasional.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang sangat strategis serta berperan dalam proses pertumbuhan wilayah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak antara 70o 32'19" sampai 70o 48'33" Lintang Selatan (LS) dan antara 110o 26'14" sampai 110o 47'51" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara = Kabupaten Boyolali
2. Sebelah Timur = Kabupaten Sukoharjo
3. Sebelah Selatan = Kabupaten Gunungkidul (DIY)
4. Sebelah Barat = Kabupaten Sleman (DIY)

Jika dilihat Kabupaten Klaten tepat berada diantara 3 kota besar, yaitu Kota Surakarta (36km), Kota Yogyakarta (30km), dan Kota Semarang (100km), Ketiga kota tersebut telah terhubung melalui jaringan transportasi yang relatif memadai. Keberadaan berbagai infrastruktur penunjang di ketiga kota tersebut, yang meliputi Bandar

Udara Internasional Ahmad Yani, Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, serta Pelabuhan Laut Tanjung Emas, secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Klaten ke arah yang lebih baik, mencakup berbagai dimensi seperti aspek budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, kependudukan, maupun sektor-sektor strategis lainnya.

Gambar 2.1 Kabupaten Klaten



Pusat pemerintahan Kabupaten Klaten terletak di Kota Klaten. Wilayah ini memiliki luas sekitar 655,56 kilometer persegi. Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, yang masing-masing terdiri dari 391 desa dan 10 kelurahan, sebagaimana yang dapat dilihat pada peta di atas.

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Klaten

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten yang tersebar pada 26 wilayah kecamatan pada tahun 2024 adalah 1.296.692 jiwa.

Tabel 1.6 Persebaran dan Kependatan Penduduk Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Prambanan	26.148	26.564	52.712
	Gantiwarno	19.488	19.603	39.091
	Wedi	26.166	26.550	52.716
	Bayat	32.189	32.185	64.374
	Cawas	28.810	29.529	58.339
	Treuk	40.505	40.063	80.568
	Kebonarum	9.800	10.111	19.911
	Jogonalan	29.957	29.936	59.893
	Manisrenggo	21.777	21.133	43.910
	Karangnongko	18.505	18.915	37.420
	Ceper	32.871	33.047	65.918
	Pedan	23.788	23.798	47.586
	Karandowo	21.703	22.170	43.873
	Juwiring	29.513	29.685	59.198
	Wonosari	31.925	32.138	64.062
	Delanggu	21.093	21.467	42.560
	Polanharjo	20.382	20.989	41.371
	Karanganom	23.310	23.869	47.179
	Tulung	27.335	27.521	54.856
	Jatinom	30.792	30.734	61.526
	Kemalang	20.065	20.307	40.372
	Ngawen	23.246	23.079	46.325
	Kalikotes	18.757	18.852	37.609
	Klaten Utara	24.217	24.686	48.903
	Klaten Tengah	20.411	21.146	41.557
	Klaten Selatan	22.161	22.701	44.862
	TOTAL	644.914	651.778	1.296.692

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

2.1.3. Desa di Kabupaten Klaten

Secara administratif, Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang meliputi 391 desa dan 10 kelurahan. Dari keseluruhan desa di Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori desa swasembada, yang artinya desa telah mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam mendukung kegiatan pembangunan regional. Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Klaten, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Cawas dan Wedi yang masing-masing memiliki 20 desa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah, namun kecamatan Klaten Tengah ini memiliki jumlah kelurahan terbanyak yakni 6 kelurahan. Kemudian Kecamatan Klaten Utara dan Jatiom masing-masing juga memiliki beberapa kelurahan, Klaten Utara memiliki 2 kelurahan dan Jatinom 1 kelurahan. Untuk kecamatan lainnya seperti Kecamatan Bayat, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, dan beberapa lainnya hanya terdiri dari desa tanpa adanya kelurahan. Untuk jumlah keseluruhan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten adalah 401 wilayah. Keberagaman ini menunjukkan perbedaan dalam perkembangan di setiap wilayah atau kecamatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan struktur pemerintahan setempat.

Setiap desa di Kabupaten Klaten memiliki keunggulan serta karakteristik khas, serta potensi yang beragam sehingga berperan

strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberagaman potensi tersebut tercermin pada sektor pertanian, industri, serta pariwisata berbasis alam yang menjadi kekuatan utama pembangunan desa. Selain itu, desa-desa di Kabupaten Klaten didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Kondisi ini ditunjang oleh banyaknya sumber mata air yang berasal dari kawasan pegunungan di sekitarnya, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian.

Kabupaten Klaten memiliki kapasitas yang signifikan sebagai daerah penghasil komoditas padi yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan regional, sehingga memperoleh predikat sebagai lumbung beras. Selain sektor pertanian, daerah ini juga menunjukkan keunggulan pada sektor industri pengolahan, antara lain industri tekstil, mebel (furniture), barang logam, serta pakaian jadi yang terkonsentrasi di Kecamatan Ceper. Di samping itu, industri skala rumah tangga dan kerajinan turut mengalami perkembangan yang pesat, dengan produk unggulan seperti gerabah dan batik tulis yang berkembang di Kecamatan Bayat dan telah dikenal hingga luar daerah.

Di sisi lain, potensi wisata berbasis alam menjadi salah satu kekuatan strategis yang dimiliki sejumlah desa di Kabupaten Klaten. Beberapa desa berhasil mengoptimalkan sumber daya alamnya

menjadi destinasi wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Salah satu contoh yang menonjol adalah keberadaan Umbul Ponggok yang menjadi daya tarik unggulan serta berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi desa secara pesat. Dalam konteks pengembangan desa, Pemerintah Kabupaten Klaten mengklasifikasikan desa-desa berdasarkan kategori Indeks Desa Membangun (IDM), yang meliputi status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Klasifikasi ini digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kemandirian serta capaian pembangunan desa secara komprehensif. Salah satu contoh desa dengan status maju di Kabupaten Klaten adalah Desa Ponggok yang pada tahun 2022 berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa maju berdasarkan IDM dengan skor 0,8102. Capaian tersebut tidak terlepas dari optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, di mana Desa Ponggok mampu mengembangkan potensi mata air sebagai destinasi wisata yang diminati banyak pengunjung. Kondisi ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Klaten memiliki sejumlah desa wisata yang mengoptimalkan beragam potensi, baik wisata alam, budaya, maupun tradisi lokal, sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

(Disbudporapar) Kabupaten Klaten, terdapat 35 desa wisata yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati sejak tahun 2010 hingga 2023. Desa-desa wisata tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu maju, berkembang, dan rintisan.

Dari keseluruhan desa wisata tersebut, terdapat lima desa wisata yang dikenal luas dan masuk dalam kategori maju karena menawarkan atraksi berbasis budaya, edukasi, dan alam. Pertama, Desa Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan yang mengoptimalkan potensi budaya melalui keberadaan Candi Sojiwan sebagai situs peninggalan sejarah. Kedua, Desa Jarum di Kecamatan Bayat yang dikenal sebagai sentra industri batik dan merupakan salah satu penghasil batik tulis terbesar di kawasan Solo Raya. Ketiga, Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo yang memanfaatkan potensi sumber mata air jernih dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata unggulan. Keempat, Desa Bugisan di Kecamatan Prambanan yang memiliki peninggalan sejarah berupa Candi Plaosan. Terakhir, Desa Janti di Kecamatan Polanharjo yang mengembangkan potensi mata air untuk kegiatan budidaya perikanan, kolam renang, serta wisata pemancingan sebagai sumber penguatan ekonomi desa.

Selanjutnya, desa wisata di Kabupaten Klaten dengan kategori berkembang merupakan desa-desa yang telah mengoptimalkan potensi kerajinan lokal dan wisata alam sehingga dikenal serta dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah. Desa-desa ini umumnya

telah memperoleh dukungan pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan pariwisata. Secara keseluruhan, terdapat sembilan desa wisata dengan kategori berkembang di Kabupaten Klaten. Beberapa di antaranya adalah Desa Ngrundul dan Desa Malangjiwa di Kecamatan Kebonarum yang mengembangkan potensi wisata air berupa Umbul Brondong dan Umbul Brintik. Selain itu, Desa Ngerangan di Kecamatan Bayat memanfaatkan potensi lokal seperti Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan, Kampung Petjel, serta cikal bakal angkringan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Di Kecamatan Polanharjo, Desa Sidowayah turut mengembangkan tiga destinasi wisata, yaitu Umbul Kemanten, Wisata Siblarak, dan Kampung Dolanan Sidowayah. Di luar contoh tersebut, masih terdapat sejumlah desa wisata kategori berkembang lainnya yang terus mengoptimalkan potensi khas masing-masing guna meningkatkan daya tarik serta jumlah kunjungan wisatawan.

Sementara itu, desa wisata dengan kategori rintisan di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana serta tingkat kunjungan wisatawan yang relatif rendah atau belum stabil. Tercatat terdapat 21 desa wisata dengan kategori rintisan di Kabupaten Klaten. Beberapa di antaranya meliputi Desa Melikan di Kecamatan Wedi

yang dikenal dengan kerajinan gerabah putaran miring dan tradisi peken pinggul. Desa Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang memiliki potensi alam seperti Girpasang, Goa Jepang, dan Kopi Sapuangin. Desa Tlogowatu di Kecamatan Kemalang mengembangkan potensi Kali Manggal sebagai daya tarik wisata alam. Desa Pokak di Kecamatan Ceper memiliki wisata air berupa Sendang Sinongko, sedangkan Desa Tanjung di Kecamatan Juwiring mengembangkan potensi kerajinan payung lukis serta wisata edukasi payung lukis. Selain contoh-contoh tersebut, masih banyak desa wisata rintisan lainnya yang memiliki potensi lokal, baik berupa sumber daya alam maupun budaya, yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dengan optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki, sejumlah desa di Kabupaten Klaten telah mampu mengelola serta mengembangkan aset lokalnya menjadi desa wisata yang diminati wisatawan. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi budaya dan keunikan desa secara lebih luas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor pariwisata desa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan lokal sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4. Profil Pemerintah Desa Ponggok

Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Desa Ponggok mempunyai luas wilayah sekitar 77.2255 Ha. Desa Ponggok berbatasan dengan desa lain, yaitu bagian utara berbatasan dengan Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Jeblog, Kecamatan Karanganyar. Bagian barat berbatasan dengan Desa Dalangan, Kecamatan Tulung. Bagian timur berbatasan dengan Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo.

Gambar 2.2 Peta Desa Ponggok



Sumber: Desa Ponggok

Desa Ponggok berada di bagian timur laut Kota Klaten. Jarak Desa Ponggok dari pusat Pemerintahan Kabupaten sejauh 15 km. Secara topografi, Desa Ponggok terletak pada ketinggian 156 m di atas permukaan air laut. Desa Ponggok mempunyai air yang berlimpah

serta mempunyai beberapa umbul atau mata air. Melimpahnya sumber air yang ada di Desa Pongkok menyebabkan desa ini memiliki sistem perairan (irigasi) lengkap.

Desa Pongkok memiliki 4 dukuh termasuk di dalamnya 12 RT dan 06 RW. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pongkok berdasarkan data BPS tahun 2024 sebanyak 2.150 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 1.068 orang dan perempuan sebanyak 1082 orang.

2.1.5. Potensi dan Kelembagaan Desa Pongkok

Guna mendorong pelaksanaan pemerintah desa, dibuatlah lembaga- lembaga yang berada di Desa Pongkok, meliputi:

- a. Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Lembaga Kemasyarakatan, yaitu: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, dan LasiZawa (Lembaga Penyalur Amal, Shodaqoh, Infaq, Zakat, Wakaf, dan Hibah).

2.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tirta Mandiri

2.2.1 Sejarah Singkat

Desa Pongkok merupakan kawasan yang memiliki kekayaan sumber mata air jernih, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan tradisi lisan yang diwariskan secara

turun-temurun oleh generasi terdahulu, sumber mata air yang dikenal dengan sebutan Umbul tersebut diyakini pernah hampir berkembang menjadi danau berukuran besar yang berpotensi menggenangi kawasan permukiman penduduk. Keyakinan tersebut berakar dari peristiwa kemunculan sepasang ikan yang menyerupai gereh pethek, yang oleh masyarakat setempat diinterpretasikan sebagai pertanda akan terjadinya bencana. Dalam rangka mencegah meluasnya Umbul, para leluhur menyelenggarakan pertunjukan ledhek dengan iringan seperangkat gamelan secara lengkap. Pada suatu ketika, seluruh instrumen gamelan beserta para penarinya dilaporkan lenyap secara tiba-tiba, dan sebagai gantinya muncul seekor burung pungguk yang bertengger di sudut pohon gayam. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perbincangan yang meluas di tengah masyarakat, sehingga desa itu selanjutnya diberi nama Desa Ponggok. Hingga saat ini, sumber mata air Umbul Ponggok masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, dan secara luas diyakini sebagai sumber air yang bersifat sakral serta mendatangkan keberkahan, khususnya menjelang bulan Ramadan, dalam sebuah tradisi lokal yang dikenal dengan nama Padusan. Tradisi tersebut tetap lestari hingga era kontemporer dan terbukti mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

Berdasarkan data yang bersumber dari laman resmi Desa Ponggok, sebelum tahun 2009 desa ini tercatat sebagai desa dengan kondisi perekonomian paling rendah di wilayah Kecamatan Polanharjo,

dan pada tahun 2001 secara resmi ditetapkan dalam kategori desa tertinggal ditinjau dari aspek infrastruktur. Pada periode tersebut, pemerintah desa belum memiliki kantor maupun fasilitas administratif yang representatif, sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terpaksa dilaksanakan di kediaman salah seorang perangkat desa. Kondisi keuangan desa pada masa itu juga sangat terbatas, ditandai dengan tidak adanya kas desa, sementara satu-satunya aset produktif yang dikelola hanyalah lahan seluas 6.300 meter persegi dengan hasil tahunan yang hanya berkisar antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Meskipun demikian, desa ini tetap memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber mata air yang melimpah, yang mampu memenuhi kebutuhan air di wilayah sekitarnya, meliputi Kecamatan Karangnom dan Kecamatan Ceper, baik untuk keperluan irigasi pertanian maupun penyediaan air minum bagi masyarakat.

Pada awal dekade 1990-an, H. Sunarta selaku kepala desa yang menjabat pada periode tersebut berhasil merealisasikan pembangunan Balai Desa dengan kelengkapan fasilitas yang cukup memadai. Keberhasilan pembangunan sarana publik tersebut mengantarkan Desa Ponggok meraih penghargaan Juara II Pos Kamling tingkat eks-Karesidenan serta Juara III Kepala Desa Berprestasi. Atas prestasi yang dicapai tersebut, H. Sunarta kembali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Desa Ponggok pada tahun 1999 dalam periode jabatan selama

delapan tahun. Dalam rentang periode kepemimpinan tersebut, desa menjalin kemitraan strategis dengan PT. Tirta Investama yang dikenal dengan merek dagang AQUA, melalui mekanisme pelepasan tanah kas desa guna melindungi kawasan sumber mata air yang dibutuhkan perusahaan sebagai bahan baku produksi dengan kandungan mineral yang tinggi. Sebagai bentuk kompensasi atas kerja sama tersebut, PT. Tirta Investama melakukan pembelian tanah desa dan memberikan penggantian berupa lahan seluas 7,815 hektar, disertai penambahan kas desa serta peningkatan Pendapatan Asli Desa yang mencapai lebih dari Rp30.000.000 per bulan.

Kepala Desa Ponggok yang saat ini menjabat, yakni Junaedhi Mulyono, menjadikan penataan lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pengembangan potensi desa sebagai destinasi pariwisata sebagai prioritas utama dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi pembangunan tersebut dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Induk Desa Ponggok periode 2013 hingga 2025, yang menitikberatkan pada upaya investasi di sektor pariwisata melalui program revitalisasi objek-objek wisata yang terdapat di wilayah desa. Strategi pembangunan yang diterapkan mencakup perencanaan tata ruang kawasan wisata secara terpadu sekaligus penyusunan berbagai paket wisata berbasis potensi lokal, dengan orientasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

serta memastikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya air di Desa Ponggok sebagai aset utama Pembangunan.

2.2.2 Pengembangan Desa Wisata Ponggok

Desa Ponggok, Desa Ponggok yang terletak di Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang berhasil mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya menjadi kawasan destinasi pariwisata. Salah satu objek wisata yang paling dikenal dan menjadi daya tarik utama desa tersebut adalah Umbul Ponggok, yakni sebuah sumber mata air alami dengan kejernihan yang khas, yang menawarkan pengalaman wisata unik berupa aktivitas berenang di bawah permukaan air menggunakan peralatan snorkel di perairan tawar yang dihuni oleh beragam spesies ikan. Di samping Umbul Ponggok, wilayah desa ini juga memiliki sejumlah sumber mata air lainnya yang turut memperkaya potensi wisata desa, antara lain Umbul Sigedang Kapilaler, Umbul Besuki, dan Umbul Ciblon.

Pengembangan desa wisata di Ponggok diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat serta didukung oleh mekanisme koordinasi antarlembaga desa, yang pada akhirnya melahirkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes Tirta Mandiri pada tahun 2009. Pendirian BUMDes tersebut dimaksudkan untuk mengelola seluruh potensi desa secara profesional dan terstruktur, sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang optimal bagi desa sekaligus

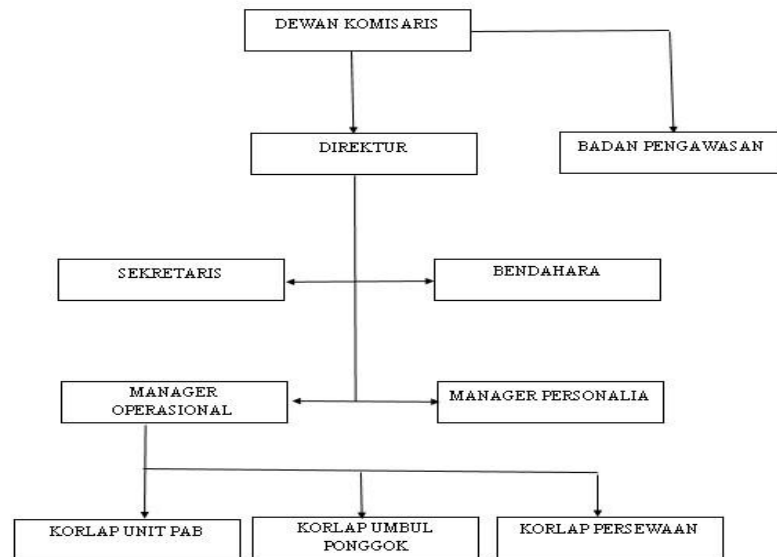
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keterlibatan aktif warga Desa Ponggok dalam proses pengembangan desa wisata secara keseluruhan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh BUMDes Tirta Mandiri sebagai lembaga pengelola utama. Dalam konteks pengembangan desa wisata di Ponggok, BUMDes menjalankan peran sentral pada tiga dimensi strategis, yaitu pertama, membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang terdapat di Desa Ponggok; kedua, mengorganisasikan masyarakat agar berpartisipasi secara lebih aktif dalam pengelolaan desa wisata; serta ketiga, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten guna mendukung keberlangsungan pengembangan desa wisata. Melalui pelaksanaan peran-peran tersebut, diharapkan masyarakat tidak sekadar berkedudukan sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang turut menentukan arah dan proses pembangunan desa secara aktif (Hastutik, 2020).

Dalam kerangka pengelolaan desa wisata di Ponggok, Umbul Ponggok menempati posisi sebagai objek wisata utama yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar, yakni mencapai lebih dari Rp1.000.000.000 per tahun, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya menghasilkan Rp17.000.000 per tahun. Pada tahun 2017, Desa Ponggok mencatatkan rekor pendapatan tertinggi sebesar Rp12.000.000.000, yang didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan yang mencapai 355.078 orang. Selain pendapatan

yang bersumber dari pengelolaan Umbul Ponggok, perekonomian desa juga ditopang oleh 11 unit usaha lainnya yang berada di bawah pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, yang secara kolektif turut memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pengelola Umbul Ponggok, pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata tercatat mencapai 507.862 orang dengan total pendapatan desa sebesar Rp1.700.000.000. Pada tahun berikutnya, angka kunjungan wisatawan mengalami penurunan menjadi 101.857 orang, yang secara langsung disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan berat terhadap sektor pariwisata secara nasional. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2020, di mana jumlah pengunjung Umbul Ponggok turun secara drastis hingga hanya mencapai 27.127 orang. Memasuki tahun 2021 seiring dengan meredanya pandemi, terjadi pemulihan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan menjadi 73.756 orang. Selanjutnya, pada tahun 2022 kunjungan wisatawan kembali meningkat dan mencapai angka 100.782 orang, dan pada tahun berikutnya tren pemulihan tersebut terus berlanjut secara konsisten.

2.2.3 Struktur Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tirta Mandiri

Gambar 2 3 Struktur Organisasi BUMdes Tirta Mandiri



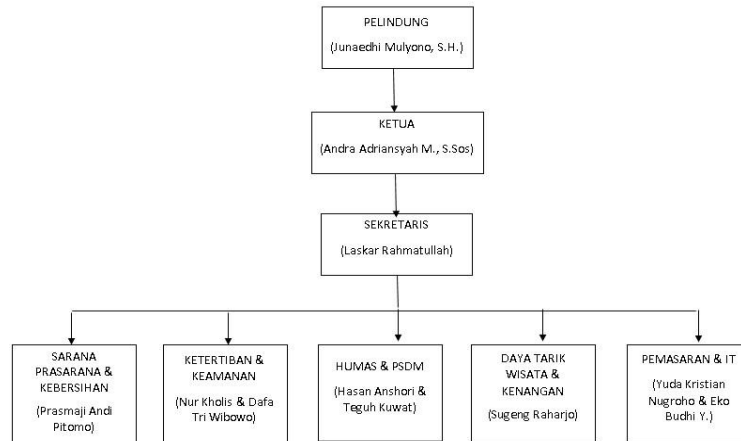
Sumber: BUMdes Tirta Mandiri Dalam AD-ART Badan Usaha Milik Desa Ponggok,

Struktur organisasi BUMDes Tirta Mandiri terdiri dari:

1. Komisaris
2. Badan Pengawas
3. Pengurus:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Karyawan

2.2.4 Struktur Pengelola Desa Wisata Pongkok

Gambar 2.4 Struktur Pengelola Desa Wisata Pongkok



Sumber: Keputusan Kepala Desa Pongkok Nomor 07 Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pongkok Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Desa Wisata Pongkok Kecamatan Polanharjo, terlihat bahwa struktur ini memiliki hierarki yang jelas dengan Kepala Desa sebagai pelindung yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas utama dan pemberi arahan strategis dalam pengelolaan desa wisata. Ketua dalam hal ini sebagai pemimpin operasional dan bertanggung jawab dalam mengoordinasi semua bidang. Sekretaris memiliki tugas administratif termasuk pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan. Dalam struktur ini terdapat pembagian bidang yang spesifik, sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dalam mengembangkan dan mempromosikan desa wisata. tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Desa Wisata Pongkok Kecamatan Polanharjo,

struktur organisasi pengelolaan desa wisata tersebut memiliki hierarki yang terstruktur dan jelas. Kepala Desa berkedudukan sebagai pelindung yang mengemban tanggung jawab sebagai pengawas utama sekaligus pemberi arahan strategis dalam keseluruhan proses pengelolaan desa wisata. Ketua organisasi berfungsi sebagai pemimpin operasional yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada, sementara Sekretaris mengemban tugas-tugas administratif yang mencakup pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Struktur organisasi ini dilengkapi dengan pembagian bidang kerja yang spesifik, sehingga memungkinkan setiap unit untuk bekerja secara lebih efektif dalam pengembangan serta promosi desa wisata.